
POTENSI SUBSEKTOR PERIKANAN PADA PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA

Masruqi Arrazy¹, Rindy Primadini²

^{1,2}Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang

Email : mas.ruqi@bps.go.id, rindy.primadini@bps.go.id

ABSTRAK

Indoneisa memiliki potensi di perikanan laut dan budidaya. Perikanan Laut kita ditopang dengan luasnya laut dan perikanan budidaya dengan banyaknya jenis budidaya yang bisa dilakukan. Namun perkembangan perikanan tidak begitu tinggi karena hanya berkontribusi 2,65 % dari PDB Indonesia. Padahal Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan/Budidaya Ikan nilainya sekitar 106,94 yang jauh diatas Nilai Tukar Petani secara umum yaitu berkisar 103,21. Namun nilai yang besar itu tidak dinikmati secara merata pada Provinsi yang ada di Indonesia. Karena adanya perbedaan tersebut maka perlu dilihat kontribusi dan pertumbuhan subsektor ini untuk masing-masing provinsi dengan metode Location Quotient (LQ). Dari hasil analisis diketahui bahwa ada 6 (enam) provinsi dengan status unggulan, 11 provinsi pada sektor tertinggal, 16 provinsi pada sektor potensial dan 1 (satu) provinsi pada sektor berkembang.

Kata kunci: Perikanan, Location Quotient, PDRB

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.491, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.671 pulau dan luas perairan laut pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia 3.110.000km²; luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km²; luas zona tambahan Indonesia 270.000km²; luas zona ekonomi eksklusif Indonesia 3.000.000 km²; Luas landas kontinen Indonesia 2.800.000 km² dengan panjang garis pantai Indonesia 108.000 km . Besarnya wilayah perairan Indonesia juga dibuktikan bahwa semua provinsi di Indonesia mempunyai pantai. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi maritim di Indonesia terutama sektor perikanan. Menurut Komnas Kajiskan (2016) Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bahkan Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2019). Namun kenyataan yang terjadi bahwa sektor ini belum berkembang dengan baik di Indonesia. Indikasi pertama bahwa kontribusi sektor ini hanya 2,65 % dari PDB Indonesia dan Perikanan tangkap di Laut Indonesia hanya sekitar 6,7 Juta Ton di tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2020b)

Hal yang sama juga terjadi pada perikanan budidaya dengan perikanan budidaya di Indonesia. Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budidaya air payau 2,96 juta ha dan budidaya laut 12,12 juta ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budidaya Tahun 2014). Namun pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budidaya air tawar, 22,74 persen pada budidaya air payau dan 2,28 persen untuk budidaya laut dengan nilai total produksi sekitar 15,77 juta ton pada tahun 2018.

Sebenarnya Potensi perikanan laut dan perikanan tidak terlalu buruk, salah satunya bisa dilihat bahwa nilai produksi mempunyai sekitar 394 Triliun Rupiah. Dengan rincian 198 Triliun untuk perikanan dan 197 Triliun untuk budidaya. Hal lain yang bisa dilihat adalah laju pertumbuhan pada sektor ini cenderung stabil. Pada tahun 2019 pertumbuhan sektor ini sekitar 58,1 sedangkan nilai pada tahun 2018 tidak jauh berbeda yaitu 5,19. Pertumbuhan sektor ini juga lebih baik pada pertumbuhan ekonomi kita yaitu 5,02 pada tahun 2019. Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan/Budidaya Ikan nilainya sekitar 106,94. Artinya menjadi petani pada sektor ini masih memiliki keuntungan karena

nilainya berada diatas 100. Nilai Tukar pada sektor ini juga lebih bagus daripada Nilai Tukar Petani secara umum yang berkisar 103,21. Nilai Tukar subsektor lainnya juga lebih rendah dibanding sektor perikanan selain sektor Peternakan.

Namun segala keuntungan perikanan di Indonesia ini memiliki masalah. Salah satu isu yang cukup hangat adalah adanya *overfishing* pada daerah tertentu. Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah perbedaan Nilai Tukar Petani Subsektor Perikanan/Budidaya Ikan antar provinsi. Ada provinsi yang sangat tinggi sekali Nilai Tukarnya yaitu Kepulauan Riau yaitu 115,94 dan Provinsi dengan Nilai Tukar terendah yaitu Papua Barat dengan kisaran nilai 97,05. Jika nilai dibawah 100 berarti tidak menguntungkan menjadi nelayan. Padahal Papua Barat memiliki 572 Desa/Kelurahan yang berada di tepi laut.

Perbedaan antara provinsi di Indonesia ini perlu menjadi perhatian dengan perlunya melihat potensi masing-masing provinsi pada sektor perikanan ini. Sehingga penenliti mengambil tema “Potensi Subsektor Perikanan pada Provinsi-Provinsi di Indonesia”.

METODE

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perhitungan terhadap Statistik pendapatan nasional/regional yang berbentuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. PDRB pada dasarnya merupakan umlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pada PDRB ada klasifikasi lapangan usaha terbagi dalam 17 kategori, setiap kategori dirinci lagi menjadi beberapa subkategori. Salah satu kategorinya adalah Kategori A: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori ini yang terdiri dari 3 subkategori yaitu Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu serta Subkategori Perikanan. Sehingga pada penelitian ini difokuskan pada PDRB Kategori A dengan Subsektor Perikanan.

Salah satu perhitungan salah satu cara dalam menentukan pentingnya suatu sektor adalah analisis Location Quotient (LQ). Arsyad menjelaskan bahwa teknik location quotient dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan (Arsyad, 2015) yaitu:

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis).
2. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (non basis).

Statistic Location Quotient (SLQ) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur suatu sektor yang merupakan sektor unggulan (sektor basic) atau tidak bagi suatu daerah. Pendekatan ini memerlukan data yang berasal dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik yang berasal dari kabupaten ataupun tingkat provinsi. *Dynamic Location Quotient* (DLQ) adalah modifikasi dari SLQ, dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu (Hajeri et al., 2015)

Penelitian ini dilakukan di seluruh Provinsi di Indonesia dengan melihat data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) masing-masing Provinsi menurut Lapangan Usaha atas periode tahun 2015 – 2019 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) Indonesia menurut Lapangan Usaha atas periode tahun 2015 – 2019. Analisis difokuskan pada Kategori A dengan Subsektor Perikanan.

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor tertentu apakah merupakan basis ekonomi suatu wilayah terutama dari kriteria kontribusi. Analisis LQ pada dasarnya merupakan analisis untuk mengetahui posisi apakah suatu wilayah berposisi sebagai net importer ataukah sebagai net exporter pada suatu produk atau sektor tertentu, dengan membandingkan antara produksi dan konsumsinya. Salah satu aspek dari analisis LQ adalah sebagai salah satu indikator untuk menentukan sektor unggulan. Nilai koefisien LQ >1 artinya sub sektor tersebut merupakan subsektor unggulan dan sangat prospek jika dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Nilai koefisien LQ <1 menunjukkan subsektor tersebut bukan subsektor andalan dan belum dapat diekspor ke luar daerah sehingga hanya dikonsumsi di wilayah yang bersangkutan, untuk itu perlu pengelolaan lebih lanjut agar subsektor ini bisa berkembang.

Metode LQ terdiri dari dua tipe analisis yaitu *Statistic Location Quotient* (SLQ) dan Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Serta gabungan dari dua analisis ini dikategorikan dalam Tipologi Klasen. Rincian masing-masing analisis yaitu

1. Analisis *Statistic Location Quotient* (SLQ)

Statistic Location Quotient (SLQ) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keunggulan suatu sektor pada suatu daerah. Adapun perhitungan SLQ adalah sebagai berikut (Hendayana, 2003).

$$LQ = \frac{V_i/V_t}{Y_i/Y_t}$$

Dimana

V_i = Nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah

V_t = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

Y_i = nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih atas

Y_t = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas

$LQ > 1$: berarti laju pertumbuhan sub sektor i di wilayah yang lebih rendah adalah lebih besar bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi atau pada tingkat wilayah yang lebih atas. Dengan demikian, sektor i merupakan sektor basis atau sektor yang unggul. $LQ < 1$: berarti laju pertumbuhan sub sektor i di wilayah yang lebih rendah adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi atau pada tingkat wilayah yang lebih atas. Dengan demikian, sub sektor i bukan merupakan sektor basis. Dan $LQ = 1$: berarti laju pertumbuhan sub sektor i di wilayah yang lebih rendah adalah sama dengan laju pertumbuhan sub sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi atau pada tingkat wilayah yang lebih atas.

2. *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah modifikasi dari SLQ, dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu, di dalam perhitungan ini dipertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah pengamatan (Hajeri et al., 2015). Perbedaan dengan SLQ terletak pada pertimbangan faktor pertumbuhan ekonomi yang ada, SLQ di dalam perhitungannya tidak mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Perhitungan dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$DLQ_{ij} = \left(\frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i} \right)^t$$

$$IPPS_{ij} = \frac{(1 + g_{ij})}{(1 + g_j)}$$

$$IPPS_i = \frac{(1 + G_i)}{(1 + G)}$$

Dimana:

DLQ_{ij} = Indeks potensi sektor i di regional

g_{ij} = Laju pertumbuhan sektor i di regional

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di regional

G_i = Laju pertumbuhan sektor i di nasional

G = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di nasional

t = Selisih tahun akhir dan tahun awal

IPPS_{ij} = Indeks Potensi Pengembangan sektor i di regional

IPPS_i = Indeks Potensi Pengembangan sektor i di nasional

DLQ > 1 = potensi pengembangan sub sektor i di wilayah yang lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di tingkat wilayah yang lebih atas dan jika DLQ < 1 = potensi pengembangan sub sektor i di wilayah yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di tingkat wilayah yang lebih atas

3. Tipologi Klasen

Tipologi Klasen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah, analisis tipologi klasen berorientasi pengelompokan sektor ke dalam empat klaster (Elysanti et al., 2015). Adapun klasternya dilihat pada tabel tentang analisis kluster

Kuadran	SLQ	DLQ	Keterangan
A	<1	<1	Sektor Tertinggal
B	<1	>1	Sektor Berkembang
C	>1	<1	Sektor Potensial
D	>1	>1	Sektor Unggulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) masing-masing Provinsi dan Indonesia menurut Lapangan Usaha atas periode tahun 2015 – 2019 baik pada subsektor perikanan serta data total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) masing-masing Provinsi dan Indonesia menurut Lapangan Usaha atas periode tahun 2015 – 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020a).

Tabel 6. Hasil SLQ Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Kode Wilayah	Provinsi	SLQ					Rata-Rata SLQ
		2015	2016	2017	2018	2019	
11	Aceh	2,03	2,01	1,96	1,97	1,99	1,99
12	Sumatera Utara	0,95	0,95	0,95	0,92	0,85	0,92
13	Sumatera Barat	1,47	1,45	1,44	1,46	1,45	1,45
14	Riau	1,18	1,16	1,10	1,08	1,05	1,11
15	Jambi	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,85
16	Sumatera Selatan	1,35	1,30	1,21	1,24	1,27	1,27
17	Bengkulu	2,96	2,94	2,87	2,83	2,82	2,88
18	Lampung	2,82	2,74	2,73	2,51	2,43	2,65
19	Kepulauan Bangka Belitung	2,77	2,75	2,53	2,62	2,67	2,67
21	Kepulauan Riau	1,07	1,10	1,03	0,93	0,83	0,99
31	DKI Jakarta	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
32	Jawa Barat	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,37
33	Jawa Tengah	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,41
34	DI Yogyakarta	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,15
35	Jawa Timur	1,01	1,00	0,99	0,93	0,87	0,96
36	Banten	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,21
51	Bali	1,84	1,81	1,79	1,82	1,78	1,81

52	Nusa Tenggara Barat	1,62	1,62	1,72	1,87	1,84	1,73
53	Nusa Tenggara Timur	2,05	2,06	2,04	2,17	2,11	2,09
61	Kalimantan Barat	0,75	0,74	0,72	0,71	0,69	0,72
62	Kalimantan Tengah	0,92	0,87	0,81	0,80	0,80	0,84
63	Kalimantan Selatan	1,42	1,43	1,46	1,50	1,50	1,46
64	Kalimantan Timur	0,59	0,59	0,60	0,61	0,61	0,60
65	Kalimantan Utara	3,00	3,02	3,05	3,15	3,15	3,08
71	Sulawesi Utara	2,81	2,70	2,64	2,60	2,69	2,69
72	Sulawesi Tengah	2,52	2,45	2,41	2,40	2,33	2,42
73	Sulawesi Selatan	3,18	3,18	3,19	3,22	3,25	3,20
74	Sulawesi Tenggara	4,18	4,42	4,45	4,44	4,33	4,36
75	Gorontalo	3,61	3,64	3,69	3,64	3,68	3,65
76	Sulawesi Barat	3,94	3,97	3,95	3,93	3,98	3,95
81	Maluku	5,73	5,56	5,46	5,40	5,39	5,51
82	Maluku Utara	2,94	2,92	2,81	2,78	2,78	2,85
91	Papua Barat	2,36	2,37	2,47	2,34	2,33	2,37
94	Papua	2,11	1,98	1,98	1,88	2,26	2,04

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (diolah)

Dari perhitungan dengan menggunakan rumusan Statistic Location Quotient (SLQ) maka didapatkan hasil yang dapat dilihat pada tabel diatas. Dari hasil diatas bisa dilihat bahwa

1. Ada 12 provinsi yang nilai SLQ dibawah 1. Artinya 12 provinsi ini subsektor perikanan bukan merupakan sektor basis/unggulan. Semua provinsi yang berada di Pulau Jawa bernilai dibawah 1. Artinya perikanan di Pulau Jawa bukan merupakan sektor unggulan. Sedangkan Indonesia pada bagian Timur yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua semuanya bernilai diatas 1. Subsektor perikanan merupakan basis pada daerah tersebut.
2. Nilai terendah berada di DKI Jakarta yaitu 0,02 sedangkan nilai tertinggi berada di Maluku dengan nilai sekitar 5,51
3. Dari nilai rata-rata SLQ memiliki rata-rata 1,8 dengan varians sekitar 1,7. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa subsektor perikanan sebenarnya masih sekor basis di Indonesia jika

dibandingkan per provinsi, namun dengan varians yang cukup tinggi menyebabkan masih ada ketimpangan antara provinsi pada subsektor ini.

Tabel 6. Hasil SLQ Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Kode Wilayah	Provinsi	Rata-Rata SLQ	DLQ	Kluster
11	Aceh	1,99	1,14	Sektor Unggulan
12	Sumatera Utara	0,92	0,16	Sektor Tertinggal
13	Sumatera Barat	1,45	0,84	Sektor Potensial
14	Riau	1,11	0,09	Sektor Potensial
15	Jambi	0,85	0,56	Sektor Tertinggal
16	Sumatera Selatan	1,27	0,22	Sektor Potensial
17	Bengkulu	2,88	0,17	Sektor Potensial
18	Lampung	2,65	0,02	Sektor Potensial
19	Kepulauan Bangka Belitung	2,67	0,35	Sektor Potensial
21	Kepulauan Riau	0,99	0,00	Sektor Tertinggal
31	DKI Jakarta	0,02	0,01	Sektor Tertinggal
32	Jawa Barat	0,37	0,25	Sektor Tertinggal
33	Jawa Tengah	0,41	0,18	Sektor Tertinggal
34	DI Yogyakarta	0,15	0,00	Sektor Tertinggal
35	Jawa Timur	0,96	0,07	Sektor Tertinggal
36	Banten	0,21	0,18	Sektor Tertinggal
51	Bali	1,81	0,23	Sektor Potensial
52	Nusa Tenggara Barat	1,73	0,48	Sektor Potensial
53	Nusa Tenggara Timur	2,09	1,06	Sektor Unggulan
61	Kalimantan Barat	0,72	0,12	Sektor Tertinggal
62	Kalimantan Tengah	0,84	0,06	Sektor Tertinggal
63	Kalimantan Selatan	1,46	1,45	Sektor Unggulan
64	Kalimantan Timur	0,60	4,36	Sektor Berkembang
65	Kalimantan Utara	3,08	3,37	Sektor Unggulan

71	Sulawesi Utara	2,69	0,10	Sektor Potensial
72	Sulawesi Tengah	2,42	0,16	Sektor Potensial
73	Sulawesi Selatan	3,20	1,17	Sektor Unggulan
74	Sulawesi Tenggara	4,36	0,43	Sektor Potensial
75	Gorontalo	3,65	0,92	Sektor Potensial
76	Sulawesi Barat	3,95	0,67	Sektor Potensial
81	Maluku	5,51	0,16	Sektor Potensial
82	Maluku Utara	2,85	0,11	Sektor Potensial
91	Papua Barat	2,37	0,57	Sektor Unggulan
94	Papua	2,04	1,44	Sektor Unggulan

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (diolah)

Jika melihat DLQ maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Provinsi yang $DLQ > 1$ hanya berjumlah 7 (tujuh) Provinsi. Hal ini menyatakan bahwa Laju Pertumbuhan pada 7 provinsi tersebut lebih besar dari nilai Indonesia.
2. Jika melihat nilai minimum adalah 0,00 yaitu pada Kepulauan Riau sedangkan nilai maksimum adalah 4,36 untuk Kalimantan Timur.
3. Rata-Rata nilai DLQ adalah 0,6 dengan varians 0,8. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan sektor perikanan tidak terlalu mengembirakan dan dengan varians yang rendah artinya hamper semua provinsi di Indonesia mengalami hal yang sama.

Jika melihat tipologi klasen dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut

1. Jika melihat secara jumlah, ada 6 (enam) provinsi dengan status unggulan, 11 provinsi pada sektor tertinggal, 16 provinsi pada sektor potensial dan 1 (satu) provinsi pada sektor berkembang.
2. Semua provinsi di Pulau Jawa merupakan sektor tertinggal.
3. Provinsi yang masuk sektor Unggulan tersebar merata pada semua Pulau di Indonesia kecuali Pulau Jawa
4. Kalimantan Timur satu-satunya provinsi yang ada pada sektor berkembang. Artinya Kalimantan Timur masih rendah kinerjanya pada sektor perikanan ini namun pertumbuhan cukup pesat pada 5 tahun terakhir.

SIMPULAN

Dari analisis SLQ dan DLQ serta Tipologi Klasen bisa disimpulkan

1. Nilai Maksimal pada SLQ adalah 5,51 yang berada di Provinsi Maluku sedangkan nilai terendah adalah DKI Jakarta yang hanya 0,02
2. Pada DLQ, nilai tertinggi pada Kalimantan Timur yaitu 4,36 sedangkan yang terendah di Kepulauan Riau dengan nilai 0,00
3. Pertumbuhan subsektor perikanan di Indonesia masih rendah karena rata-rata nilai DLQ di Indonesia masih dibawah 1 yaitu 0,6 namun sektor ini sudah memiliki kinerja yang cukup baik dengan rata-rata SLQ berada di 1,8.
4. Kinerja Subsektor ini sayangnya masih belum merata dengan varians pada SLQ 1,7 dan laju pertumbuhannya juga memiliki belum merata karena memiliki varians 0,8.
5. Potensi Perikanan di Indonesia sebenarnya cukup besar. Hal ini bisa terlihat dengan adanya 6 (enam) provinsi pada sektor unggulan, 15 provinsi pada sektor potensial dan 1 (satu) provinsi pada sektor berkembang. Sedangkan yang tertinggal hanya 11 Provinsi.

Sehingga ada beberapa Provinsi yang menarik perhatian

1. Kepulauan Riau. Provinsi yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ini sebenarnya bekinerja baik karena nilai SLQ-nya adalah 0,99. Nilai ini mendekati batas nilai agar sektor ini menjadi unggulan/basis yaitu 1. Namun nilai DLQ yang mendekati 0 bisa memeberikan kita kesimpulan bahwa perkembangan perikanan pada provinsi ini stagnan sehingga sektor ini masuk menjadi sektor tertinggal di Provinsi ini.
2. Provinsi di Pulau Jawa. Jika secara volume Provinsi di Pulau Jawa selalu mendominasi jumlah di Indonesia. Namun jika melihat rendahnya Sektor ini dalam perikanan di Indonesia ($SLQ < 1$) dan rendahnya pertumbuhan pada sektor ini ($DLQ < 1$) menyebabkan semua provinsi di Pulau Jawa masuk sebagai sektor tertinggal untuk sektor perikanan.
3. Kalimantan Timur. Provinsi ini masih rendah kontribusinya pada sektor perikanan ($SLQ = 0,66$) namun yang mengejutkan bagaimana tingginya pertumbuhan sektor ini ($DLQ = 4,36$). Pertumbuhan sektor Perikanan di Kalimantan Timur juga jauh dari rata-rata secara nasional. Dalam artian pertumbuhannya luar biasa.
4. Kalimantan Utara. Sebagai provinsi termuda di Indonesia nilai SLQ dan DLQ nya diatas rata-rata. Bisa disimpulkan kinerja sektor ini ckup bagus dan pertumbuhannya juga baik.

5. Maluku dan Maluku Utara. Sebagai provinsi kepulauan kinerja perikanan dari kedua provinsi ini cukup bagus. Namun pertumbuhannya cukup rendah sehingga perlu perhatian lebih pada sektor ini pada kedua provinsi ini

Dari hasil diatas bisa diperhatikan hal-hal berikut

1. Rendahnya sektor ini di Pulau Jawa perlu dikaji lagi hal-hal yang mendasar sehingga diketahui penyebab dari hal tersebut.
2. Fokus perikanan harus bergeser dari Pulau Jawa ke luar pulau Jawa sehingga bisa terjadi pemerataan
3. Provinsi yang berada di sektor tertinggal selain pulau Jawa juga bisa dikaji permasalahannya terutama pada Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
4. Provinsi satu-satunya yang berada pada sektor berkembang yaitu Kalimantan Timur perlu mendapatkan perhatian lebih. Karena pertumbuhannya paling pesat perlu dilakukan Langkah yang tepat agar sektor perikanan berada di jalur yang seharusnya
5. Provinsi pada sektor potensial perlu dikaji potensi masing-masing provinsi. Potensi masing-masing provinsi berbeda-beda. Contohnya Maluku dengan nilai SLQ yang paling tinggi dibandingkan provinsi lain ternyata nilai DLQ-nya hanya 0,16
6. Sedangkan yang sektor unggulan perlu dikaji kekuatan-kekuatan masing-masing provinsi agar bisa lebih dioptimalkan

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*.
- Badan Pusat Statistik. (2020a). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019*. BPS-Statistics Indonesia. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2020b). *Statistik Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Elysanti, S., P, T. H., & D, H. C. (2015). Analisis Tipologi dan Sektor Potensial Dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*, 1–9. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68296>
- Hajeri, H., Yurisinthae, E., & Dolorosa, E. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian

di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 253.
<https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12485>

Hendayana, R. (2003). Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Jurnal Informatika Pertanian*, 12(Desember 2003), 1–21.
<http://www.litbang.pertanian.go.id/warta-ip/pdf-file/rahmadi-12.pdf>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). *Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2019*.

Puspa, R., Permana, A., & Karunia, E. (2020). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN BERDASARKAN BAURAN PEMASARAN PADA SUPERMARKET K-STORE KRAKATAU JUNCTION. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(2), 208-216.